



PEMERINTAH
PROVINSI JAMBI

BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025





**TERIMA KASIH KEPADA SELURUH
PPTK
TAHUN ANGGARAN 2025
DI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAMBI**



KATA PENGANTAR



Puji Syukur kehadirat ALLAH SWT, karena atas perkenanNYA laporan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan.

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan.

Laporan kegiatan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam pelaksanaan Program/Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 dan menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang.

Jambi, Januari 2026

KEPALA BAHAN,

Drs. H. ISMED WIJAYA, MM

NIP. 19701025 199003 1002

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami, laporan tersebut telah dilakukan Review oleh Inspektorat Provinsi Jambi.

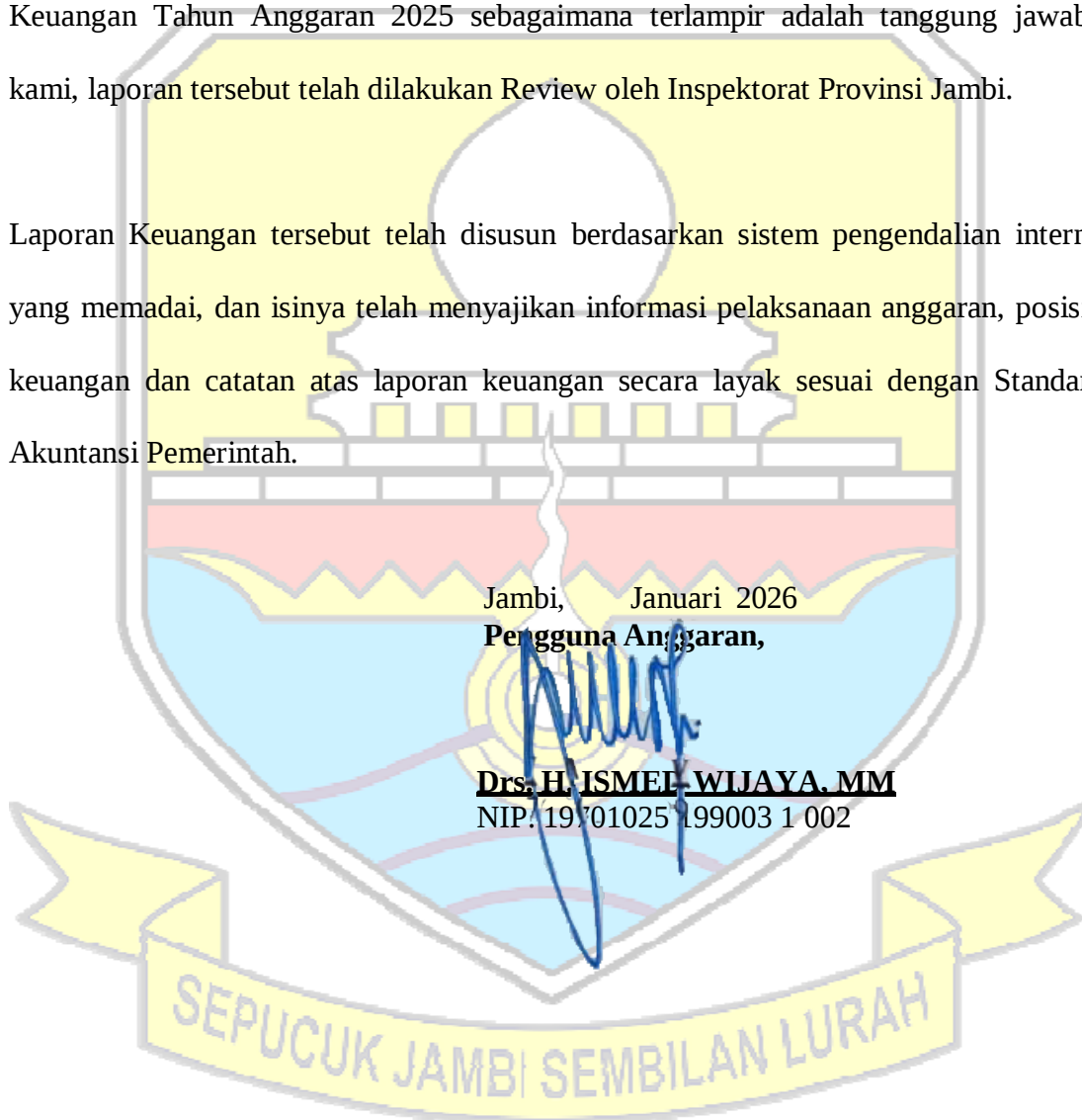
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Jambi, Januari 2026

Pengguna Anggaran,

Drs. H. ISMEL WIJAYA, MM

NIP. 19701025 199003 1 002



RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Kepala Satuan Kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan satuan kerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada satuan kerja.

Laporan Keuangan Satuan Kerja tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2025 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp
20,040,127.848,- atau mencapai 92 % dari anggarannya Rp.
21.880.640.033,-

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2025 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset lancar per 31 Desember 2025 adalah sebesar
Rp.325.222.956.608,00

Jumlah kewajiban jangka pendek per 30 Desember 2025 adalah sebesar
Rp 0,00,-

Jumlah ekuitas dana lancar per 31 Desember 2025 adalah sebesar
Rp. 2.571.196.898,12

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

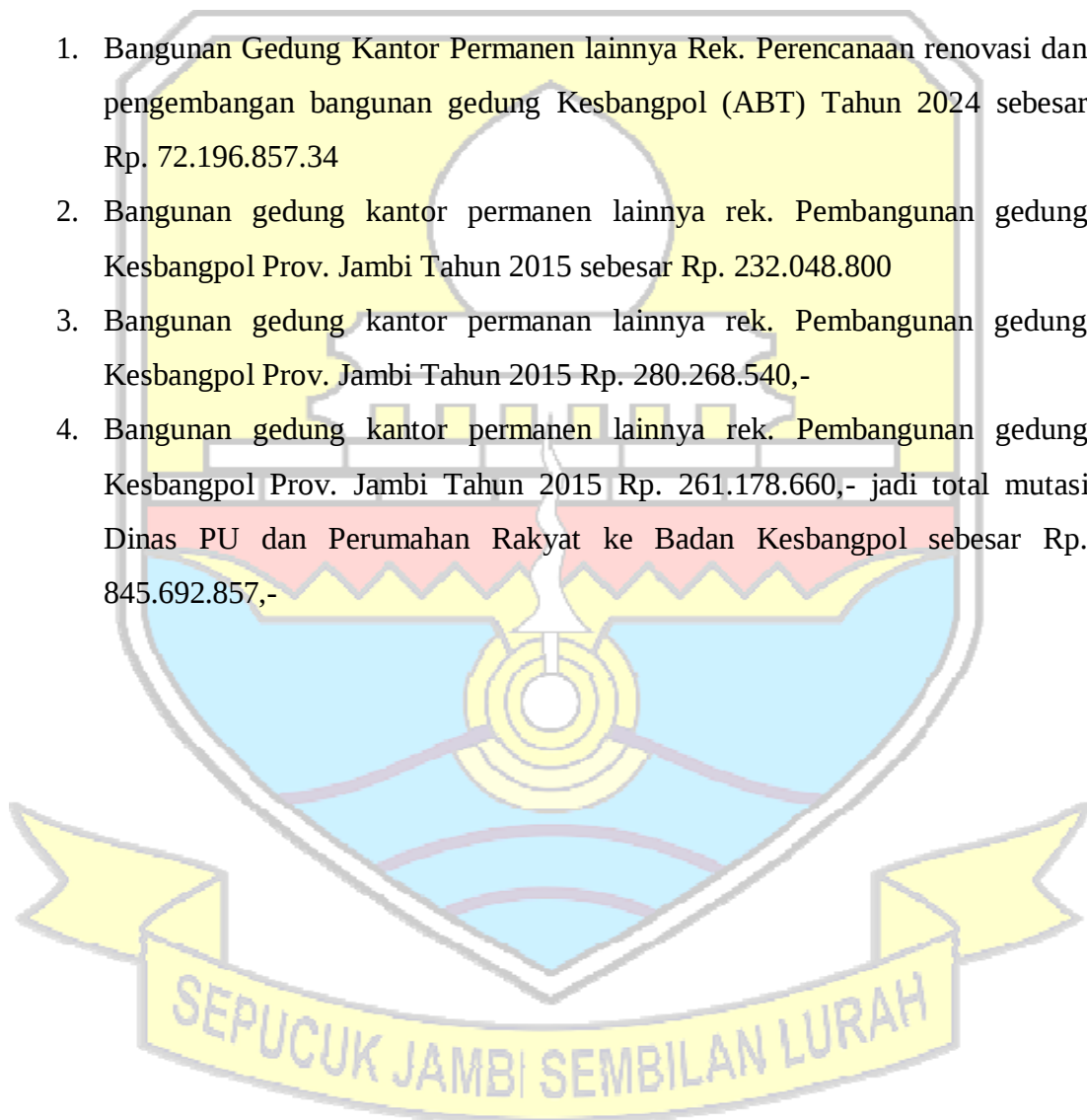
Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian laporan realisasi anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN).

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Berdasarkan Mutasi dari Dinas PU Prov. Jambi Kepada Badan Kesbangpol Prov. Jambi berupa

1. Bangunan Gedung Kantor Permanen lainnya Rek. Perencanaan renovasi dan pengembangan bangunan gedung Kesbangpol (ABT) Tahun 2024 sebesar Rp. 72.196.857.34
2. Bangunan gedung kantor permanen lainnya rek. Pembangunan gedung Kesbangpol Prov. Jambi Tahun 2015 sebesar Rp. 232.048.800
3. Bangunan gedung kantor permanen lainnya rek. Pembangunan gedung Kesbangpol Prov. Jambi Tahun 2015 Rp. 280.268.540,-
4. Bangunan gedung kantor permanen lainnya rek. Pembangunan gedung Kesbangpol Prov. Jambi Tahun 2015 Rp. 261.178.660,- jadi total mutasi Dinas PU dan Perumahan Rakyat ke Badan Kesbangpol sebesar Rp. 845.692.857,-



DAFTAR ISI

COVER.....	i
SELAYANG PANDANG	ii
DAFTAR PPTK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
DAFTAR ISI.....	viii
LRA, NERACA,LPE,LO.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Maksud.....	1
1.1.2 Tujuan.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.....	2
 BAB II PEMBAHASAN.....	 4
2.1 Ekonomi Makro	4
2.2 Kebijakan Keuangan.....	5
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja SKPD.....	7
 BAB III IKTISIAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	 14
3.1 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2023	21
 BAB IV KEBIJAKAN AKUTANSI.....	 29
4.1 Entitas Akutansi dan Entitas Pelaporan Keuangan.....	29
4.2 Basis Akutansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	29
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Laporan Keuangan SKPD	29
4.4 Penerapan Kebijakan Akutansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akutansi Pemerintah	30
 BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	 31
5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	31
5.1.1 Pendapatan.....	31
5.1.2 Belanja.....	31
5.1.3 Aset	31
5.1.4 Kewajiban.....	32
5.1.4 Ekuitas.....	32
 BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN.....	 34
BAB VII PENUTUPAN	35

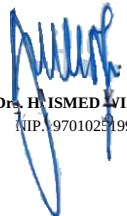


PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	BELANJA DAERAH	21.880.640.033,00	20.033.904.833,00	91,55	162.611.645.554,00
5.1	BELANJA OPERASI	21.782.012.127,00	19.935.276.927,00	91,52	162.466.861.554,00
5.1.01	Belanja Pegawai	7.702.770.050,00	5.954.322.308,00	77,30	7.126.800.591,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.875.213.077,00	7.776.925.619,00	98,75	9.770.661.963,00
5.1.05	Belanja Hibah	6.204.029.000,00	6.204.029.000,00	100,00	145.569.399.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	21.782.012.127,00	19.935.276.927,00	91,52	162.466.861.554,00
5.2	BELANJA MODAL	98.627.906,00	98.627.906,00	100,00	144.784.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.627.906,00	98.627.906,00	100,00	144.784.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	98.627.906,00	98.627.906,00	100,00	144.784.000,00
	JUMLAH BELANJA	21.880.640.033,00	20.033.904.833,00	91,55	162.611.645.554,00
	SURPLUS/DEFISIT	(21.880.640.033,00)	(20.033.904.833,00)	91,55	(162.611.645.554,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(21.880.640.033,00)	(20.033.904.833,00)	91,55	(162.611.645.554,00)

Provinsi Jambi, 31 Maret 2026
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


Drs. H. ISMED WIJAYA, MM
NIP. 97010251990031002



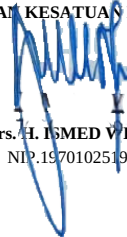
PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	2.340.249.944,26	2.568.103.304,81
1.1	ASET LANCAR	5.687.184,00	334.500,00
1.1.12	Persediaan	5.687.184,00	334.500,00
	JUMLAH ASET LANCAR	5.687.184,00	334.500,00
1.3	ASET TETAP	2.306.483.260,26	2.539.689.304,81
1.3.02	Peralatan dan Mesin	5.233.411.805,50	5.134.783.899,50
1.3.03	Gedung dan Bangunan	2.281.342.163,34	2.299.342.163,34
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	215.969.050,00	215.969.050,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(5.424.239.758,58)	(5.110.405.808,03)
	JUMLAH ASET TETAP	2.306.483.260,26	2.539.689.304,81
1.5	ASET LAINNYA	28.079.500,00	28.079.500,00
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	12.316.500,00	12.316.500,00
1.5.01.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	12.316.500,00	12.316.500,00
1.5.04	Aset Lain-lain	215.359.679,50	215.359.679,50
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(199.596.679,50)	(199.596.679,50)
	JUMLAH ASET LAINNYA	28.079.500,00	28.079.500,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	2.340.249.944,26	2.568.103.304,81
2	KEWAJIBAN	20.552.472,00	11.441.829,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	20.552.472,00	11.441.829,00
2.1.06	Utang Belanja	20.552.472,00	11.441.829,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	20.552.472,00	11.441.829,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	20.552.472,00	11.441.829,00
3	EKUITAS	2.319.697.472,26	2.556.661.475,81
3.1	EKUITAS	2.319.697.472,26	2.556.661.475,81
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(20.229.247.318,06)	(162.761.835.650,14)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	20.033.904.833,00	162.611.645.554,00
	JUMLAH EKUITAS	2.319.697.472,26	2.556.661.475,81
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.340.249.944,26	2.568.103.304,81

Provinsi Jambi, 31 Maret 2026
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


Drs. H. ISMED WIJAYA, MM
NIP.197010251990031002



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	2.556.661.475,81	2.664.676.767,01
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(20.229.247.318,06)	(162.761.835.650,14)
RK PPKD	20.033.904.833,00	162.611.645.554,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(41.621.518,49)	42.174.804,94
EKUITAS AKHIR	2.319.697.472,26	2.556.661.475,81

Provinsi Jambi, 31 Maret 2026
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

Drs. H. ISMED WIJAYA, MM
NIP.197010251990031002



PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	20.229.247.318,06	162.761.835.650,14	(142.532.588.332,08)	(87,57)
8.1	BEBAN OPERASI	19.939.034.886,00	162.469.632.299,00	(142.530.597.413,00)	(87,73)
8.1.01	Beban Pegawai	5.954.322.308,00	7.126.800.591,00	(1.172.478.283,00)	(16,45)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	7.780.683.578,00	9.773.432.708,00	(1.992.749.130,00)	(20,39)
8.1.05	Beban Hibah	6.204.029.000,00	145.569.399.000,00	(139.365.370.000,00)	(95,74)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	19.939.034.886,00	162.469.632.299,00	(142.530.597.413,00)	(87,73)
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	290.212.432,06	292.203.351,14	(1.990.919,08)	(0,68)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	241.754.280,56	243.565.199,67	(1.810.919,11)	(0,74)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	43.058.925,24	43.238.925,22	(179.999,98)	(0,42)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.399.226,26	5.399.226,25	0,01	0,00
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	290.212.432,06	292.203.351,14	(1.990.919,08)	(0,68)
	JUMLAH BEBAN	20.229.247.318,06	162.761.835.650,14	(142.532.588.332,08)	(87,57)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(20.229.247.318,06)	(162.761.835.650,14)	142.532.588.332,08	(87,57)

Provinsi Jambi, 31 Maret 2026
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK**

Drs. H. ISMED WIJAYA, MM
NIP. 197010251990031002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud

Penyusunan laporan keuangan ini dimaksudkan untuk menjamin adanya keseragaman pengakuan, pengukuran, pengklasifikasian dalam setiap transaksi yang terjadi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi agar Laporan Keuangan ini dapat dimengerti dan memperoleh penafsiran yang sama.

1.1.2. Tujuan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi selaku entitas akuntansi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan spesifik laporan keuangan SKPD adalah:

- a. Menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran dana.
- b. Menyajikan data realisasi anggaran dalam tahun 2025.
- c. Menyajikan informasi mengenai target kinerja yang telah dicapai dalam tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

1. UUD 1945, Khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara.
2. UU. Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
3. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

5. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi berbasis Akrua pada Pemerintahan Daerah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2014 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

1.3. **Sistimatika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.**

Unsur Laporan Keuangan ini menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut :

1) Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan informasi pertanggungjawaban SKPD atas pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan realisasinya dalam periode satu tahun.

2) **Neraca**

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai aset (kekayaan), hutang (kewajiban) dan ekuitas dana dari suatu entitas. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

3) **Laporan Operasional**

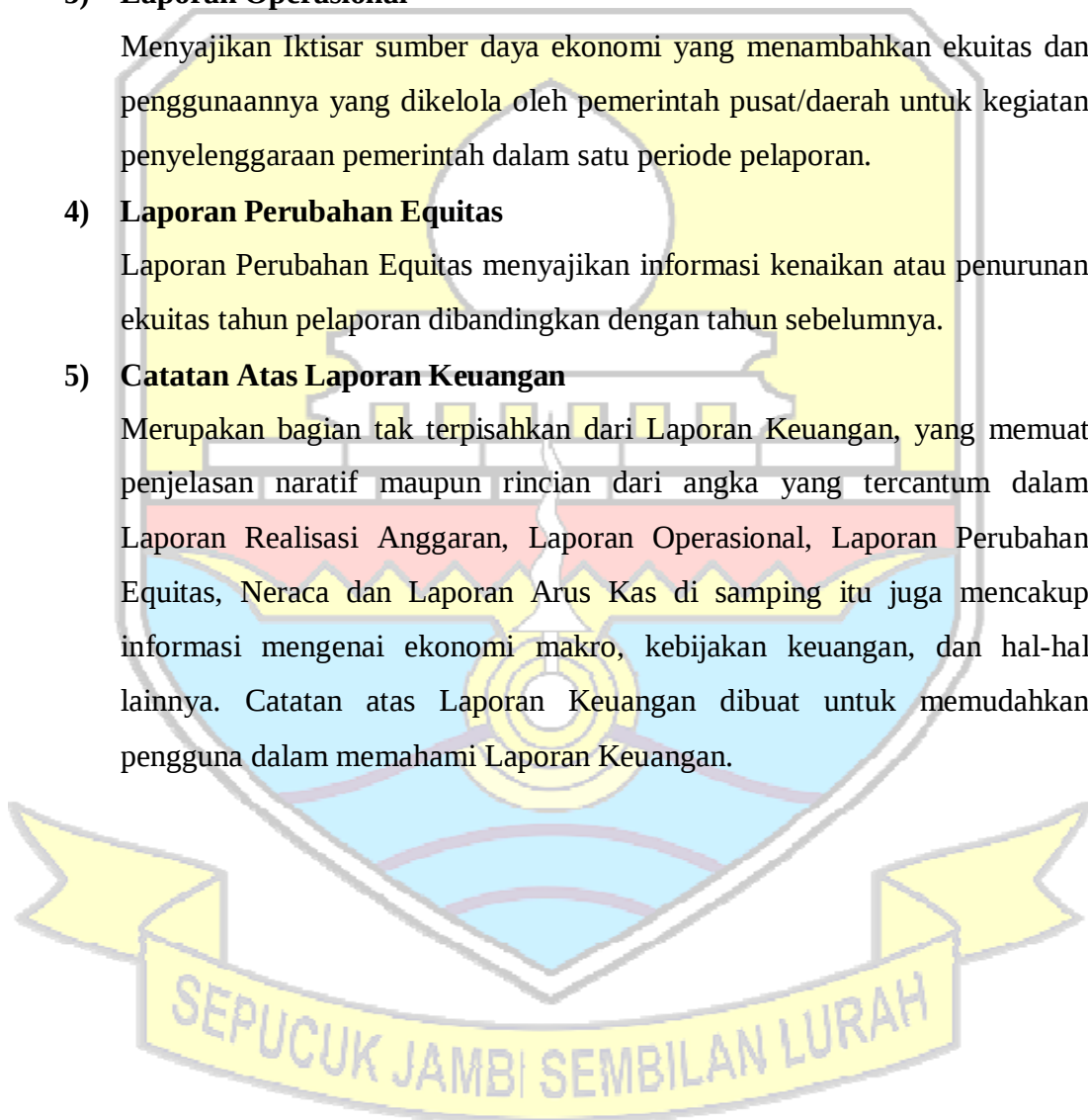
Menyajikan Iktisar sumber daya ekonomi yang menambahkan ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

4) **Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5) **Catatan Atas Laporan Keuangan**

Merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan, yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas di samping itu juga mencakup informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan hal-hal lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1. Ekonomi Makro.

Kekayaan Indonesia (sumber daya alam dan sumber daya manusia) saat ini belum optimal dimanfaatkan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia antara lain kemiskinan dan kekerasan, dikarenakan pembangunan wawasan kebangsaan yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa Pancasila belum tuntas dan belum menjadi prioritas.

Era Orde Reformasi saat ini (kajian Lemhanas) pemahaman dan penghayatan akan wawasan kebangsaan yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila terutama untuk generasi muda cenderung menurun. Penetrasi budaya global yang cenderung sekuler, materialistik, individualistik, konsumtif cenderung lebih dominan mewarnai perilaku masyarakat Indonesia. Menurunnya wawasan kebangsaan berakibat menurunnya nasionalisme dan daya saing serta melemahnya karakter. Untuk itu perlu upaya strategis, sistemik, cepat, tepat dan bersama-sama melalui pembangunan wawasan kebangsaan/karakter bangsa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan bangsa dan politik, dengan tujuan untuk menciptakan kondisi yang aman dan nyaman di daerah.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi berkomitmen dengan visi “ *mewujudkan kesatuan bangsa dan politik yang kondusif, harmonis, komunikatif dan dinamis dalam rangka menuju Jambi MANTAP.* ”

Untuk mewujudkan visi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik sejalan dengan semangat reformasi
- Membina secara efektif nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dan kedaulatan rakyat.
- Mengembangkan sistem pembinaan yang profesional dan terpercaya.
- Mereposisi diri dari peran regulator menjadi fasilitator, komunikator dan moderator bagi proses demokratisasi.

2.2. Kebijakan Keuangan.

Laporan Keuangan Badan Kesbangpol Provinsi Jambi Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban sebagai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 berupa laporan keuangan terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) .

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan Keuangan tahun anggaran 2025 mengacu kepada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)

Dalam tahun anggaran 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mendapat alokasi dana dalam APBD Provinsi Jambi sebesar Rp. 21.782.012.127,- (Dua Puluh Satu Miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta dua belas ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 6 (ENAM) program dan 62 (enam puluh dua) kegiatan, keseluruhan kegiatan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

N O	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Belanja Operasi
1	2	3
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	21.782.012.127
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	21.782.012.127
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	8.922.893.165
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	123.771.810
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.607.806
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	97.164.004
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.838.237.781
	penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.702.770.050
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	135.467.731
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.720.000
	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.720.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	300.867.942
	Penyed komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	30.117.775
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	36.495.775
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	600.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	233.654.392
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	332.003.776
	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000

	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	158.233.500
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	168.770.276
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.291.856
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	190.509.600
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	96.782.256
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	4.401.491.949
8	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	4.401.491.949
	Perumusan kebijakan teknis dibidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, Karakter Bangsa, Pembauran kebangsaan . Bhineka Tunggal ika dan sejarah kebangsaan	2.606.522.133
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.484.033.077
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	310.936.739
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	6.597.971.188
9	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	6.597.971.188
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6.290.418.890

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	280.934.798
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	26.617.500
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	794.768.816
10	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	794.768.816
	Penyusunan Program kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	124.471.320
	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi Dan Mediasi Sangketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	648.368.000
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sangketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	21.929.496
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI , SOSIAL DAN BUDAYAPROGRAM PEMBERDAYAAN	348.005.305
11	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	348.005.305
	Penyusunan Program kerja dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosisl. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	87.828.125
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	260.177.180

VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	716.881.704
12	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	716.881.704
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	364.628.952
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	37.836.400
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	37.799.392
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	276.616.960
JUMLAH		21.782.012.127

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja SKPD

Indikator Kinerja

Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja input, output dan outcome. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut telah dapat dirumuskan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing – masing kegiatan. Kendatipun untuk indikator outcome belum seluruhnya dapat diukur tingkat pencapaian.

Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah, sedangkan indikator output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan, seperti jumlah kegiatan yang dilaksanakan, jumlah orang yang mengikuti sosialisasi dan sebagainya, sedangkan indikator outcome belum dapat diukur pada tahun pertama.

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
1	2	3
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Tahun
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Tahun
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Tahun
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Tahun
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Tahun
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun

	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan jasa surat menyurat	1 Tahun
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Tahun
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun
II	<i>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</i>	
8	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
	Perumusan kebijakan teknis dibidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, Karakter Bangsa, Pembauran kebangsaan . Bhineka Tunggal ika dan sejarah kebangsaan	1 Tahun
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Tahun
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Tahun
III	<i>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</i>	

9	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Tahun
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Tahun
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Tahun
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
10	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
	Penyusunan Program kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Tahun
	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi Dan Mediasi Sangketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Tahun
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sangketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Tahun
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI , SOSIAL DAN BUDAYAPROGRAM PEMBERDAYAAN	

11	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Tahun
	Penyusunan Program kerja dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosisl. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Tahun
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Tahun
VI	<i>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</i>	
12	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Tahun
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Tahun
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Tahun
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Tahun

BAB III

IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pengukuran kinerja diperlukan dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan mencapai yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran dengan rencana kinerja (performance) yang dicapai organisasi.

Hasil Pengukuran kinerja mengenai pencapaian indikator pada tingkat sasaran tahunan dan kegiatan tertuang pada :

1. Formulir PPK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) yang memberikan informasi tentang tingkat pencapaian target dari kegiatan yang telah ditentukan.
2. Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran) yang memberikan informasi tentang tingkat pencapaian target dari sasaran yang telah ditentukan.

Untuk melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja sasaran, digunakan kerangka pengukuran kinerja dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4. Kerangka Pengukuran Kinerja

Persentase Pencapaian Sasaran	Kriteria
$\geq 90 \%$	Berhasil
70 % - 89,99 %	Cukup Berhasil
50 % - 69,99 %	Kurang Berhasil
$\leq 49,99 \%$	Tidak Berhasil

Tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukuran kinerja dapat diilustrasikan dalam tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI	
		Target Kinerja 2025	%
1	2	3	4
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1 Tahun	92
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1 Tahun	92
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1 Tahun	81
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	95
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Tahun	97
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Tahun	94
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	78
	penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	77
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Tahun	100
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	97
	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Tahun	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Tahun	97
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	100
	Penyed komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	98
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	100
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	100

6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	99
	Penyediaan jasa surat menyurat	1 Tahun	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	98
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	99
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Tahun	99
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun	100
II	<i>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</i>	1 Tahun	99
8	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Tahun	99
	Perumusan kebijakan teknis dibidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, Karakter Bangsa, Pembauran kebangsaan . Bhineka Tunggal ika dan sejarah kebangsaan	1 Tahun	100
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Tahun	99
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Tahun	90
III	<i>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</i>	1 Tahun	100
9	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1 Tahun	100

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Tahun	100
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Tahun	94
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Tahun	100
IV	<i>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</i>	1 Tahun	99
10	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 Tahun	99
	Penyusunan Program kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Tahun	98
	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Tahun	100
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Tahun	94
V	<i>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYAPROGRAM PEMBERDAYAAN</i>	1 Tahun	100
11	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Tahun	100
	Penyusunan Program kerja dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosisl. Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Tahun	100

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Tahun	100
VI	<i>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</i>	1 Tahun	100
12	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 Tahun	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Tahun	100
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Tahun	100
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Tahun	100
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Tahun	100
JUMLAH		1 Tahun	92



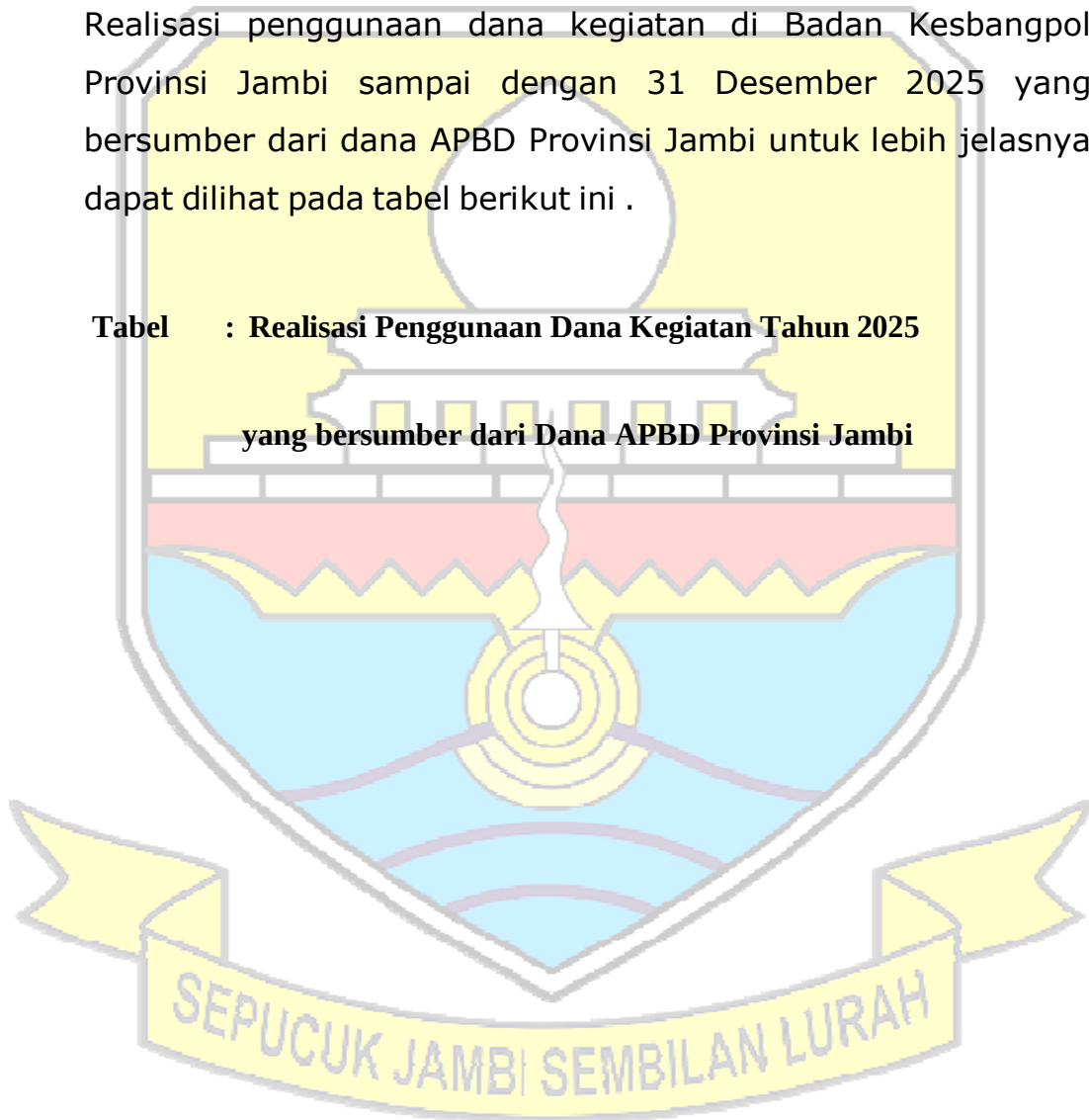
Tabel 5. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

.3. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025

Keberhasilan suatu pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tidak terlepas dari ketersediaan dana.

Realisasi penggunaan dana kegiatan di Badan Kesbangpol Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2025 yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini .

**Tabel : Realisasi Penggunaan Dana Kegiatan Tahun 2025
yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Jambi**



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Belanja Operasi	Per 31 Desember 2025
1	2	3	4
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	21.782.012.127	20.040.127.848
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	21.782.012.127	20.040.127.848
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	8.922.893.165	7.264.567.567
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	123.771.810	117.606.263
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.607.806	25.874.214
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Ralisasi Kinerja SKPD	97.164.004	91.732.049
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.838.237.781	6.095.339.808
	penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.702.770.050	5.960.314.438,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	135.467.731	135.025.370
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.720.000	15.180.000
	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.720.000	15.180.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	300.867.942	299.837.447
	Penyed komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	30.117.775	29.533.925
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	36.495.775	36.493.780
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	600.000	600.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	233.654.392	233.209.742
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Da	-	98.627.906
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	98.627.906
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	332.003.776	327.072.855
	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000	5.000.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	158.233.500	154.975.301
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	168.770.276	167.097.554
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.291.856	310.903.288
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	190.509.600	189.260.100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	96.782.256	96.749.606
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	24.893.582
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	4.401.491.949	4.349.457.071
8	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	4.401.491.949	4.349.457.071
	Perumusan kebijakan teknis dibidang idelogi wawasan kebangsaan, bela negara, Karakter Bangsa, Pembaurankebangsaan . Bhineka Tunggal ika dan sejarah kebangsaan	2.606.522.133	2.595.072.782,00
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.484.033.077	1.474.292.650,00
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	310.936.739	280.091.639,00
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	6.597.971.188	6.572.186.498
9	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	6.597.971.188	6.572.186.498
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6.290.418.890	20 6.282.956.400,00
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan		

V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI , SOSIAL DAN BUDAYAPROGRAM PEMBERDAYAAN	348.005.305	347.468.700
11	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	348.005.305	347.468.700
	Penyusunan Program kerja dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosisl. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	87.828.125	87.792.000,00
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	260.177.180	259.676.700,00
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	716.881.704	716.679.712
12	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	716.881.704	716.679.712
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	364.628.952	364.500.952
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	37.836.400	37.836.400
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	37.799.392	37.725.600
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	276.616.960	276.616.760
JUMLAH		21.782.012.127	20.040.127.848

Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan, evaluasi dan analisis menunjukkan bahwa dari 62 kegiatan yang telah ditetapkan, semuanya mencapai diatas 92 %, dengan kreteria **berhasil**.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya, yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Dari pengertian diatas maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah sebagai entitas akuntansi, hanya menyampaikan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Basis akuntansi yang diguna dalam laporan keuangan SKPD adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam laporan Realisasi Anggaran basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima dari rekening kas umum daerah. Dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Bendahara Pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti asset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan SKPD tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

Penyusunan pos – pos laporan keuangan SKPD (asset, kewajiban dan ekuitas dana) didasari nilai perolehan histori, yaitu asset dicatat/diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas, kewajiban dicatat/diukur sebesar nilai nominal dan ekuitas dana dicatat/diukur sebesar selisih asset dengan kewajiban.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Secara umum standar akuntansi pemerintah telah diterapkan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, terutama proses akuntansi yang dimulai dari jurnal, buku besar dan Neraca baik untuk penatausahaan pendapatan maupun penatausahaan pengeluaran, karena untuk tahun anggaran 2025 ini semua proses akuntansi diselenggarakan dengan program aplikasi SIPD.



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1. Rincian dan Penjelasan masing masing Pos – pos Pelaporan Keuangan SKPD .

5.1.1. Pendapatan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi tidak memiliki sumber pendapatan.

5.1.2. Belanja

Jumlah belanja tahun anggaran 2025 sebesar Rp 21.782.018.127,- (Dua Puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh tujuh rupiah) terdiri dari 6 Program 62 kegiatan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 realisasi belanja keseluruhan sebesar Rp. 20.040.127.848,-(92 %)

5.1.3. Asset

Jumlah aset per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 2.723.804.023,67 terdiri dari :

Asset Lancar :

- a. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 Nihil
- b. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 Nihil
- c. Saldo investasi jangka pendek juga nihil
- d. Piutang Nihil
- e. Persediaan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp.5.687,184,00 yang terdiri dari Persediaan Alat kantor pakai habis dan Bahan Penggandaan Cetak

Asset tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 2.492.895.462, 12,-

Aset tetap terdiri dari

Peralatan dan Mesin Rp. 2.492.895.462, 12,-

Terdiri dari:

- Alat-alat Bantu Rp. 6.912.000,-
- Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Rp. 3.109.507.000,-
- Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp.1.092.660.885,50,-
- Alat Studio Komunikasi dan Pemancar Rp. 151.615,-
- Alat Kesehatan Umum Rp. 2.600.000,-

- Komputer Rp. 870.116.920,-
- Gedung dan Bangunan Rp. 2.281.342.163,34,-

Apabila dibandingkan dengan tahun 2024 ada tambahan aset sebesar Rp. 8.960.000,-. Disebabkan adanya pengadaan aset sebagai berikut :

1. Komputer Rp.8.960.000,-

Sedangkan Akumulasi penyusutan Rp. 5.237.827.553,72

Aset Lainnya

Aset lainya yang merupakan barang rusak berat per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 28.079.500,-

5.1.4. Kewajiban

Sampai dengan posisi 31 Desember 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi tidak memiliki kewajiban kepada pihak lain baik kewajiban jangka pendik maupun kewajiban jangka panjang.

- a. Utang perhitungan fihak ketiga (PFK) nihil
- b. Uang muka dari kas daerah nihil
- c. Pendapatan diterima dimuka nihil
- d. Utang jangka pendek lainnya Tidak ada

- Listrik 0
- Air 0
- Telepon 0 ,-

5.1.5. Ekuitas

Sesuai dengan penjelasan dalam bab sebelumnya bahwa asset yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi terdiri aset lancar dan asset tetap, maka ekuitasnya terdiri dari ekuitas dana lancar dan ekuitas dalam bentuk investasi.

Ekuitas Dana lancar berjumlah Rp. (2.571.196.898,12),- terdiri dari :

- a. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek sebesar Rp. 0,-

- b. Cadangan persediaan per 31 Desember 2025 Nihil
- c. Uang muka dari kas daerah nihil

Ekuitas Dana Investasi tahun 2025 sebesar Rp 2.723.804.023,67,- terdiri dari:

- a. Investasi dalam aset tetap Rp. 2.694.475.156,67
- b. Investasi dalam aset lainnya Rp. 28.079,500

Apabila dibandingkan dengan ekuitas dana investasi tahun 2024 sebesar Rp. **2.571.196.898,12** maka terjadi penurunan ekuitas dana investasi



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi berdomisili di Jalan R. M. Nur Atmadibrata nomor 04 Telanaipura Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. .

Tugas pokok dan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut diatas dioperasionalkan dengan berpedoman kepada :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomr 60 tahun 2008 tentang Sistem pengendalian intern pemerintah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun 2011 tentang Pedoman pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor nomor 12 tahun 2006 tentang Forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2007 tentang Fasilitas organisasi masyarakat bidang kebudayaan, keraton dan lembaga adat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2007 tentang Pedoman Pendaftaran organisasi kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman pendidikan wawasan kebangsaan.

BAB VII PENUTUP

Secara keseluruhan target kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Jambi yang ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2022 yang meliputi 6 program dan 33 kegiatan telah tercapai rata-rata 92 % , realisasi keuangan mencapai 92 %, ini mengandung makna adanya kesesuaian jadwal dalam pengelolaan keuangan dan semua kegiatan telah mencapai target dengan kriteria "Berhasil".

Oleh sebab itu kedepan Badan Kesbangpol Provinsi Jambi akan senantiasa berupaya agar efisiensi keuangan dapat ditingkatkan sehingga dapat mencapai produktivitas yang optimal, Amin.

